



Relasi Makna Falsafah *Poda Na Lima* Dengan Politik Pembangunan Pilkada Serentak 2024

Izuddinsyah Siregar

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
email: izzuregar@gmail.com

Abstrak: Analisis kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana *Poda Na Lima* dapat diadaptasi dalam konteks politik, khususnya dalam Pilkada Serentak 2024 pada daerah Tapanuli bagian selatan di Provinsi Sumatera Utara yakni Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Suku Angkola-Mandailing, yang tersebar lima daerah tersebut memiliki kearifan lokal yang dikenal dengan *Poda Na Lima*, sebuah falsafah hidup yang mencakup lima nasihat utama. *Poda Na Lima* terdiri dari: *paias rohamu* (bersihkan jiwamu), *paias pamatangmu* (bersihkan tubuhmu), *paias parabitonmu* (bersihkan pakaianmu), *paias bagasmu* (bersihkan rumahmu), dan *paias pakaranganmu* (bersihkan lingkunganmu). Nilai-nilai ini telah lama menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat Angkola-Mandailing. Kajian ini menekankan bahwa makna falsafah *Poda Na Lima* dalam politik pembangunan pilkada serentak 2024 adalah sebagai panduan moral dan kekuatan dalam politik pembangunan bagi para pemimpin untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan mengeksplorasi nilai-nilai *Poda Na Lima* dari perspektif politik, penelitian ini menawarkan konsep bahwa falsafah tersebut dapat menjadi prinsip dasar pembangunan politik yang menekankan etika, integritas, dan tanggung jawab.

Kata kunci: pilkada serentak 2024, *Poda Na Lima*, relasi makna

The Relationship of the Meaning of the Philosophy of Poda Na Lima in Relation to the Development Politics of the 2024 Simultaneous Regional Elections

Abstract: The analysis of this study aims to explain how *Poda Na Lima* can be adapted in a political context, especially in the 2024 Simultaneous Regional Elections in the southern Tapanuli area in North Sumatra Province, namely Padangsidempuan, South Tapanuli, Mandailing Natal, Padang Lawas, and North Padang Lawas. The Angkola-Mandailing tribe, which is spread across five regions, has a local wisdom known as *Poda Na Lima*, a philosophy of life that includes five main pieces of advice. *Poda Na Lima* consists of: *paias rohamu* (cleanse your soul), *paias pamatangmu* (cleanse your body), *paias parabiton mu* (clean your clothes), *paias bagasmu* (clean your house), and *paias pakaranganmu* (clean your environment). These values have long been a guideline in the social life of the Angkola-Mandailing community. This study emphasizes that the philosophical meaning of *Poda Na Lima* in the politics of development for the 2024 simultaneous regional elections is as a moral guide and strength in development politics for leaders to run a clean, transparent, and community-oriented government. By exploring the values of *Poda Na Lima* from a political perspective, this research offers the concept that the philosophy can be a basic principle of political development that emphasizes ethics, integrity, and responsibility.

Keywords: simultaneous regional elections 2024, *Poda Na Lima*, meaning relations



PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024 yang diikuti 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kotamadya. Tahun ini masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam 33 kabupaten/kotamadya bagiannya akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota melalui Pilkada Serentak 2024 (news.detik.com).

Pada tahun 2024 masyarakat Provinsi Sumatera Utara termasuk daerah-daerah yang didiami oleh suku Angkola-Mandailing seperti Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara, turut serta dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024 (Sijaya, 2021). Fenomena ini menjadi sangat menarik mengingat daerah-daerah ini memiliki warisan budaya yang sarat dengan kearifan lokal yakni *Poda Na Lima*. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai *Poda Na Lima* dapat diterapkan dalam pembangunan politik, terutama sebagai dasar untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih beretika, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Masyarakat Angkola-Mandailing merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah Sumatera Utara, dengan kearifan lokal yang kuat dan menjadi pedoman dalam kehidupan mereka (Siregar, 2022). Kearifan lokal *Poda Na Lima* adalah sebuah falsafah hidup yang berisi lima petuah atau nasihat. *Poda Na Lima* terdiri dari: *paias rohamu* (bersihkan jiwamu/hatimu), *paias pamatangmu* (bersihkan tubuhmu/badanmu), *paias parabitonmu* (bersihkan pakaianmu), *paias bagasmu* (bersihkan rumahmu), dan *paias pakaranganmu* (bersihkan lingkunganmu) (Alam, 2011). Nilai-nilai ini telah lama menjadi landasan keteraturan sosial dan kehidupan bermasyarakat bagi suku Angkola-Mandailing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana *Poda Na Lima* dapat diadaptasi dalam konteks politik, khususnya dalam Pilkada Serentak 2024 pada daerah Tapanuli bagian selatan di Provinsi Sumatera Utara yakni Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara

Melalui momen Pilkada Serentak 2024, penulis tertarik untuk menggeneralisasi makna *Poda Na Lima* dari sudut pandang politik. Konsep ini dapat diadaptasi sebagai prinsip dasar dalam politik pembangunan di mana *Poda Na Lima* dapat menekankan pentingnya etika dan integritas dalam kehidupan politik, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Tentunya melalui artikel ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru terkait penerapan nilai-nilai lokal dalam dinamika politik modern, khususnya di Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan pada artikel ini akan dijelaskan secara konseptual melalui analisis generalisasi dalam mengkaji relasi makna falsafah *Poda Na Lima* dalam kaitannya dengan politik pembangunan Pilkada Serentak 2024.

Pertama, *paias rohamu* (bersihkan jiwamu/hatimu). Secara umum dimaknai sebagai upaya untuk membersihkan atau memurnikan pikiran, hati, atau jiwa seseorang dari segala hal negatif atau destruktif yang mempengaruhi seseorang secara spiritual atau

emosional. Dari sudut pandang politik, konsep *paias rohamu* dapat diartikan sebagai upaya untuk membersihkan atau memurnikan sikap, prinsip, atau moralitas individu (Widodo, 2014). Dalam konteks ini berarti meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman tentang isu-isu penting yang memengaruhi masyarakat. Ini termasuk pemahaman tentang sistem politik, kebijakan publik, hak asasi manusia, dan partisipasi dalam proses demokrasi (Ulfiyyati et al., 2023).

Paias rohamu dalam sudut pandang politik juga dimaknai dengan menghindari kebencian atau kedengkian. Ini bisa mengacu agar tidak terjerumus dalam politik identitas atau polarisasi yang penuh kebencian. Terlebih *paias rohamu* dari sudut pandang politik juga berarti memilih dialog yang konstruktif, toleransi terhadap perbedaan pendapat, dan bermusyawarah mencari kesepakatan yang saling menguntungkan.

Tidak kalah penting juga, *paias rohamu* dari tindakan perilaku koruptif yang artinya menjauhkan diri dari tindakan perilaku korupsi, kolusi, nepotisme, atau praktik tidak etis lainnya dalam konteks politik (Fatlolon, 2023). *Paias rohamu* dari sudut pandang politik bisa juga dimaknai sebagai bagian dari upaya menegakkan standar moral dan integritas dalam tindakan dan keputusan politik. Secara keseluruhan, *paias rohamu* dari sudut pandang politik berarti membentuk sikap, prinsip, dan tindakan politik yang didasarkan pada integritas, toleransi, dan kesadaran akan kepentingan bersama.

Kedua, *paias pamatangmu* (bersihkan tubuhmu/badanmu). Secara harfiah dalam konteks ini 'badan' dapat merujuk pada entitas politik tertentu seperti partai politik, pemerintah, atau bahkan sistem politik secara keseluruhan. *Paias pamatangmu* dari sudut pandang politik diinterpretasikan sebagai analogi untuk membersihkan atau memperbaiki sistem politik dari berbagai masalah atau kekurangan yang mungkin ada di dalamnya dengan konsep melakukan reformasi politik atau perbaikan sistem politik (Nambo & Puluhuluwa, 2005).

Paias pamatangmu dalam pandangan politik juga dapat dipandang sebagai perbaikan proses demokrasi untuk memastikan partisipasi yang sehat dari semua warga negara, serta mencegah manipulasi atau intimidasi politik yang dapat mengganggu integritas dan proses politik (Rajuspa & Maulia, 2024). Kemudian ditopang dengan memperkuat norma-norma atau etika dalam politik, seperti tidak menggunakan narasi kebencian dan fitnah dalam kampanye politik. Melainkan melakukan tindakan positif dalam tindakan mempromosikan dialog yang bermartabat dan konstruktif antara berbagai pihak dalam lingkaran politik (Hermanto, 2020).

Ketiga, *paias parabitonmu* (bersihkan pakaianmu). Dalam sudut pandang politik, *paias parabitonmu* diibaratkan untuk membersihkan atau memurnikan citra dan reputasi politik seseorang atau kelompok. Pakaian sering kali digunakan sebagai simbol representatif dari identitas dan status seseorang yang di mana dalam konteks politik pakaian dapat melambangkan citra atau reputasi politik (Darmaputri, 2010).

Pada intinya, *paias parabitonmu* dari sudut pandang politik menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas, transparansi, dan reputasi yang baik dalam semua aspek kehidupan politik. Ini tidak hanya penting untuk memenangkan dukungan terhadap calon kandidat tertentu, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat untuk memimpin dan menjaga citra yang positif, serta membangun kepercayaan dengan mengikuti prinsip-prinsip etika dan profesionalisme (Islamy, 2020).

Keempat, *paias bagasmu* (bersihkan rumahmu). Dalam sudut pandangan politik *paias bagasmu* dapat diartikan sebagai upaya untuk membersihkan atau memperbaiki tatanan atau kondisi politik di dalam suatu negara, wilayah, dan daerah. *Paias rohamu* sebagai upaya untuk membersihkan atau memperbaiki kondisi politik di dalam negeri atau lingkungan politik di mana individu atau pemerintah berada (Nugroho, 2012). *Paias rohamu* menggambarkan pentingnya memperbaiki sistem politik internal negara, wilayah, dan daerah untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Paias bagasmu juga mencakup upaya untuk mendorong partisipasi politik yang lebih besar dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini berarti memberdayakan warga negara untuk terlibat dalam politik, baik melalui pemilihan umum atau kegiatan partisipasi lainnya (Rista & Wiranata, 2024). *Paias bagasmu* dalam sudut pandang politik tentu membutuhkan penegakan standar etika yang tinggi di antara para pemimpin politik dan penyelenggara pemerintahan. Hal ini mencakup menghindari konflik kepentingan, taat kode etik, dan menunjukkan tanggung jawab dan integritas dalam tindakan politik.

Kelima, *paias pakaranganmu* (bersihkan lingkunganmu). *Paias pakaranganmu* dalam sudut pandang politik dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga, melindungi, dan memperbaiki kondisi lingkungan secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kebijakan, regulasi, dan tindakan politik yang diperlukan untuk mencapai tujuan (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Ini menekankan pentingnya tanggung jawab politik dalam perlindungan lingkungan alam dan sumber daya alam demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.

Paias pakaranganmu dalam politik juga berarti melindungi sumber daya alam seperti tanah, air, udara, hutan, dan keanekaragaman hayati lainnya. Lingkungan harus dijaga dengan membuat kebijakan dan program untuk konservasi sumber daya alam, seperti penghijauan, kebijakan bebas polusi, mendaur ulang sampah, dan lainnya. Diperlukan langkah strategis untuk melindungi lingkungan hidup dari polusi, degradasi, dan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia (Ulum & Ngindana, 2017). Tindakan berani dan tegas membuat regulasi yang ketat terhadap industri atau siapa pun pelaku pencemar dan perusak lingkungan. Hal ini bertujuan untuk melindungi, menjaga, dan meningkatkan lingkungan hidup untuk generasi saat ini dan mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penafsiran *Poda Na Lima* dari sudut pandang politik adalah suatu konsep bahwa falsafah tersebut dapat menjadi prinsip dasar pembangunan politik yang menekankan etika, integritas, dan tanggung jawab, yang tentu baik dilestarikan dan dilaksanakan. *Poda Na Lima* sebagai suatu falsafah melalui ungkapan memberi nasehat di mana kedudukan falsafah ini akan semakin kuat jika diimplementasikan menjadi panduan moral dan kekuatan dalam politik pembangunan bagi para pemimpin untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip ini mendorong pemimpin untuk selalu bertindak dengan integritas, menjaga ketertiban, dan kebaikan dalam lembaga yang dipimpin, serta menciptakan lingkungan politik yang adil dan harmonis bagi semua .

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Sutan Tinggi Barani Perkasa. (2011). *Pembaharuan dan Modernisasi Adat Budaya Tapanuli Selatan : Petunjuk Cara Pelaksanaan Horja dan Mangkobar dalam Upacara Adat Hombar Adat Dohot Ibadat*. Medan: Mitra.
- Darmaputri, G. L. (2010). Representasi Identitas Kultural dalam Simbol-Simbol pada Batik Tradisional dan Kontemporer. *Commonline Departemen Komunikasi*, 4(2), 45–55.
- Fatlolon, C. (2023). Politik Kebohongan, Politik Kebenaran, dan Demokrasi Indonesia: Perspektif Etika Politik Buddhisme. *Fides et Ratio: Jurnal Teologi Kontekstual Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon*, 8(2), 89–101.
- Hermanto, A. B. (2020). Etika Berdemokrasi Pancasila dalam Konstestasi Politik di Era Digitalisasi. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 6(2), 91–104.
- Islamy, A. (2020). Paradigma Sosial Profetik dalam Kode Etik Politik di Indonesia. *ASY Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 5(2), 155–179.
- KPU Siapkan Tahapan Pilkada, Dimulai April 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7252895/kpu-siapkan-tahapan-pilkada-dimulai-april-2024>.
- Nambo, A. B., & Puluhuluwa, M. R. (2005). Memahami tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik). *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 21(2), 262–285.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1).
- Rajuspa, M. R., & Maulia, S. T. (2024). Dinamika Sistem Politik di Indonesia: Tantangan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(10), 81–90.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12.
- Rista, D., & Wiranata, I. H. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan: Landasan Demokrasi yang Inklusif melalui Pemberdayaan Warga Negara Menuju Masyarakat yang Demokratis. *Prosiding Semdikjar (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran)*, 7, 1216–1227.
- Sijaya, A. (2021). *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*. Bantul: Samudra Biru.
- Siregar, I. (2022). Interpretasi *Poda Na Lima* sebagai Pendidikan Karakter pada Masyarakat Angkola-Mandailing. *Jurnal Pancasila*, 3(1), 1–6.
- Ulfyyati, A., Muhamad, R., & Akbari, I. S. (2023). Demokrasi: Tinjauan terhadap Konsep, Tantangan, dan Prospek Masa Depan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 435–444.
- Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Universitas Brawijaya Press.
- Widodo, W. (2014). Muwujudkan Budaya Politik Santun, Bersih dan Beretika dalam Rangka Memperkokoh Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Humanika*, 19(1), 114–129.